



## **Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Paket Pekerjaan Masih Menjadi Masalah Dalam Pemeriksaan LKPD**

**Semarang, Jumat (26/05/23)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang dan Pemkab Jepara menerima LHP atas LKPD Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). LHP atas LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng Hari Wiwoho kepada Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma'arif, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, dan Pj. Bupati Jepara Edy Supriyanta. Atas LKPD dua kabupaten tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Acara penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Semarang dan Kabupaten Jepara digelar di ruang Rawa Pening Gedung Kantor BPK Jateng. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Sekretariat Perwakilan Setyo Esti Agustini dan Kepala Subauditorat Jateng I Bagus Kurniawan. Dari pemerintah daerah, hadir para sekretaris daerah dan kepala OPD dari masing-masing kabupaten.

Kalan BPK Jateng Hari Wiwoho menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah (pemda) mempertahankan predikat WTP seperti tahun-tahun sebelumnya. "Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut antara lain kelebihan pembayaran tunjangan keluarga PNS, pembayaran belanja gaji dan tunjangan tidak sesuai ketentuan, serta kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi paket pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, pemerintah daerah wajib segera melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi BPK.

Hari Wiwoho berharap agar para pimpinan dan anggota DPRD dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi yang disampaikan dalam LHP untuk mendorong pemerintah daerah lebih meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD secara transparan dan akuntabel. "Sehingga dapat terwujud peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata," tutur Hari.

---

### **Informasi lebih lanjut:**

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat  
Telp. 024-8660826 Ext. 2013  
Email: [humas.jateng@bpk.go.id](mailto:humas.jateng@bpk.go.id)